

## SINOPSIS

Pada 1 Januari tahun 2002 pelaksanaan Otonomi Daerah telah dimulai berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999. Pada tahun 2004 UU No.22 tahun 1999 ini direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 namun pelaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan perkembangan maka pemerintah mengeluarkan PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana didalamnya juga terdapat indikator penilaian pelaksanaan Otonomi Daerah. Penulis memilih fokus pada EKPOD karena untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kota Yogyakarta dipilih sebagai unit analisa karena memiliki PAD yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak namun padat karena luas wilayahnya juga tidak besar maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan harapan dan untuk mengetahui apa saja kekurangan dari penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (deskriptif). Jenis data primer dan sekunder. Data primer dengan cara wawancara, data sekunder dengan cara melakukan dokumentasi. Unit analisa adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan kinerja otonomi daerah pada tahun 2008. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Yogyakarta. Dokumentasi diperoleh dari data-data BPS (DIY dan Kota Yogyakarta). Yang selanjutnya menganalisa data-data yang diperoleh dari BPS dan Narasumber.

Aspek kesejahteraan masyarakat, segi pemerataan ekonomi, pertumbuhan PDRB adalah yang paling baik. kesejahteraan sosial, yang paling baik adalah persentase keluarga tidak miskin. Sedangkan dari segi seni budaya dan olahraga yang paling baik adalah ketersediaan klub olahraga. Pada aspek pelayanan umum, pelayanan dasar yang paling baik adalah jumlah fasilitas kesehatan. Dari segi pelayanan penunjang yang paling baik adalah angka partisipasi angkatan kerja. Aspek daya saing daerah, dari segi kemampuan ekonomi daerah, produktivitas total daerahnya sangat menonjol. Dari segi infrastruktur, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah yang paling baik. Dari segi iklim berinvestasi, kemudahan perijinan adalah yang paling baik. Dari segi SDM, kualitas tenaga kerja.

Kinerja otonomi daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 sudah baik. Pencapaian kinerja yang paling baik dalam aspek kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan yaitu 82% KK tidak miskin. Yang paling buruk yaitu kriminalitas 282 kasus. Aspek pelayanan umum, yang paling baik adalah kesehatan. Sedangkan yang terburuk adalah rasio akseptor KB hanya 35.000 pengguna. Dari aspek daya saing daerah, yang paling baik adalah produktivitas total daerah. Sedangkan kinerja yang paling buruk adalah tingkat kriminalitas 282 kasus.

Rekomendasi : meningkatkan keamanan agar tindak kriminalitas menurun dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi investor untuk berinvestasi sehingga memunculkan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjalankan program KB dan memberikan penyuluhan langsung pada masyarakat untuk meningkatkan pengguna akseptor KB dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik.